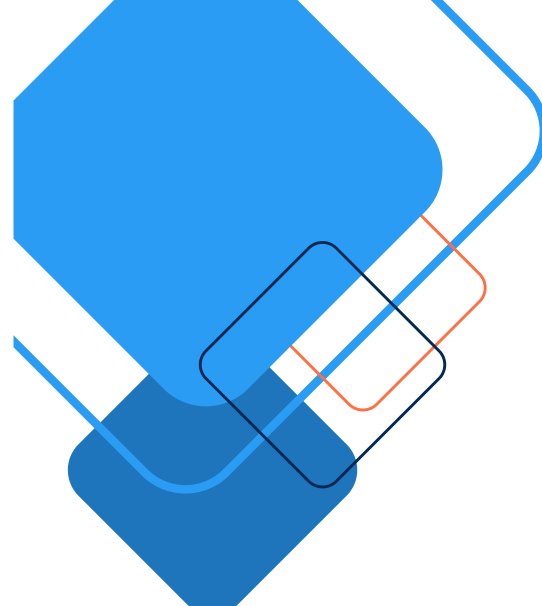
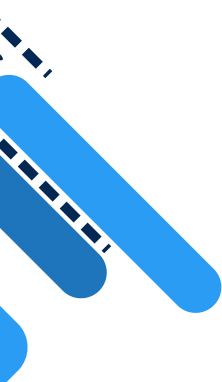
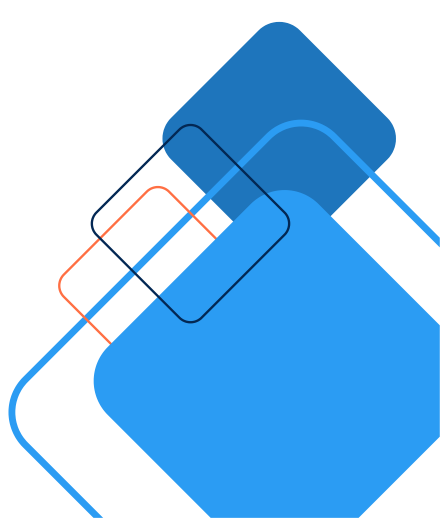




PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder* terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya.

Pangkal Pinang, 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkal Pinang

FAHRIZAL, S.T.,M.M
Pembina Tk I /IVb
NIP. 198502062008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung, termasuk perlunya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);

21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.3 Sistematika Perubahan RENJA 2025

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan:

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 59.557.913.215,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							7		8		9		10						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	58.130.634,951	89,89	955.492.986							89,890	955.492.986	100	2	Sekretariat
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	77,80		0								0,000		0		Sekretariat
10		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	57.443.549,083	25	871.793.577							25	871.793.577	25	2	Kasubbag PEP dan Keuangan
11		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	57.443.549,083	29	871.793.577							29	871.793.577	96,667	1,518	Kasubbag PEP dan Keuangan
10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-99	20.000.000	0	0							0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan
11			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	20.000.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag PEP dan Keuangan
18		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	266.186.800	25	32.414.884							25	32.414.884	25	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7.499.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2.320.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	63.570.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22		050301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	42.797.800	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	0	32.414.884							0	32.414.884	0,000	21,610	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	6.100.000	10	0							10	0	10	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	6.100.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

24		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	288.965.676	25	40.127.509						25	40.127.509	25	14	Kasubag Umum dan Kepegawaian
25		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	90.000.000	0	9.905.813						0	9.905.813	0,000	11,006	Kasubag Umum dan Kepegawaian
26		050301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	30.000.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
27		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	168.965.676	0	30.221.696						0	30.221.696	0,000	17,886	Kasubag Umum dan Kepegawaian
28		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	105.833.392	25	11.157.016						25	11.157.016	25	11	Kasubag Umum dan Kepegawaian
29		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	57.061.696	1	2.860.000						1	2.860.000	100,000	5,012	Kasubag Umum dan Kepegawaian
30		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Persninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Dengan Satuan:Unit)	4	27.500.000	4	3.918.400						4	3.918.400	100,000	14,249	Kasubag Umum dan Kepegawaian
31		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.271.696	1	4.378.616						1	4.378.616	100,000	20,584	Kasubag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																49,939	1,644	
PREDIKAT KINERJA																		
32		050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	28	835.453.264	27	57.405.528						26,640	57.405.528	95	7	Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	49		49							49,000		100		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		84							84,060		84		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	8		0							0,000		100		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase jumlah event yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		0							0,000		0		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	93		0							0,000		0		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
33		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	531.529.264	26	44.308.928						26	44.308.928	26	8	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
34		050302201001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	73.436.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
35		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.100.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

36		050302201003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	1	16.050.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
37		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
38		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	144.298.000	0	0						0	0	0,000	0,000	
39		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	243.445.264	0	41.028.928						0	41.028.928	0,000	16,853	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
40		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	14.200.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
41		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000	0	3.280.000						0	3.280.000	0,000	21,867	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
42		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:%)	100	134.340.000	20	3.280.000						20	3.280.000	20	2	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
43		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	56.140.000	0	1.640.000						0	1.640.000	0,000	2,921	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
44		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	49.000.000	0	1.640.000						0	1.640.000	0,000	3,347	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
45		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	29.200.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
46		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	122.649.000	23	9.816.600						23	9.816.600	23	8	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
47		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	20	10.000.000	6	6.536.600						6	6.536.600	30,000	65,366	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
49		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	6	69.000.000	0	3.280.000						0	3.280.000	0,000	4,754	
50		050302203007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.449.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
51		050302203014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	35	18.200.000	20	0						20	0	57,143	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
52		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun (Dengan Satuan:%)	100	46.935.000	15	0						15	0	15	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
53		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	1	11.650.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
54		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	58	22.285.000	0	0						0	0	0,000	0,000	
55		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	13.000.000	0	0						0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																63,200	6,871	
PREDIKAT KINERJA																		

56		050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:%)	30	591.825.000	33	3.280.000								33,120	3.280.000	100	1	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:%)	33		30									30,030		91		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
57		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	91.950.000	25	0								25	0	25	0	
58		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	75	91.950.000	0	0								0	0	0,000	0,000	
59		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	499.875.000	20	3.280.000								20	3.280.000	20	1	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
60		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	499.875.000	0	3.280.000								0	3.280.000	0,000	0,656	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		95,500	0,554	
PREDIKAT KINERJA																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																		69,546	3,023	
PREDIKAT KINERJA																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				Pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena ada anggaran Gaji Pokok PPPK Kota Pangkal Pinang yang dititipkan ke BKPSDMD																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				Melaksanakan proses pencairan anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan																

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
BULAN : MARET 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
KEPEGAWAIAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30	ORANG	57.443.549.083		871.793.577	1,52	25	APBD Kota PKP	
			Belanja gaji pokok PNS			1.468.525.711	-	411.107.000				
			Belanja gaji pokok PPPK			54.045.689.660	-	12.280.467				
			Belanja tunjangan keluarga PNS			163.907.855	-	43.175.614				
			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			7.437.334		1.719.265				
			Belanja tunjangan jabatan PNS			90.763.750	-	33.400.000				
			Belanja tunjangan jabatan PPPK			8.635.000		0				
			Belanja tunjangan fungsional PNS			155.719.500	-	22.110.000				
			Belanja tunjangan fungsional PPPK			6.132.000		2.070.000				
			Belanja tunjangan fungsional umum PNS			28.166.250	-	5.900.000				
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			-		0				
			Belanja tunjangan beras PNS			99.373.522	-	24.912.480				
			Belanja Tunjangan Beras PPPK			5.191.916		1.110.440				
			Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			4.279.219	-	958.199				
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			22.802		0				
			Belanja pembulatan gaji PNS			20.650	-	5.262				
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK			20.146		170				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			1.268.120.000	-	302.040.000				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			12.000.000						
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			46.384.000	-	5.786.000				
			Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			29.305.596	-	4.651.920				
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1.712.988	-	251.880				
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2.141.184	-	314.880				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN		VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI				SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)			
								RP	(%)				
2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1	PAKET	7.499.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.499.000	-	0					
		2.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2	PAKET	2.320.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP		
			Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			1.020.000	-	0					
			Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			1.300.000	-	0					
		3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2	PAKET	63.570.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			24.339.700	-	0					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			16.215.300	-	0					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			20.570.000							
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			-							
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.445.000							
		4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1	PAKET	42.797.800		-	0,00	25	APBD Kota PKP		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			42.797.800	-	0					
		5.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1	LAPORAN	150.000.000		32.414.884	21,61	30	APBD Kota PKP		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150.000.000	-	32.414.884					
3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1	LAPORAN	90.000.000		9.905.813	11,01	25	APBD Kota PKP		
			Belanja Tagihan Telepon			1.500.000	-	166.604					
			Belanja Tagihan Listrik			88.500.000	-	9.739.209					
		2.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	LAPORAN	30.000.000		-	0,00	28	APBD Kota PKP		
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			15.710.000	-	0					
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			4.270.000							
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			6.570.000	-	0					
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			3.450.000							
		3.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1	LAPORAN	168.965.676		30.221.696	17,89	25	APBD Kota PKP		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			8.500.000	-	800.000					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			14.235.500	-	0					
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			124.358.480	-	24.893.080					
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			21.271.696	-	4.378.616					
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah			600.000	-	150.000					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI				SUMBER DANA	KET
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)			
							RP	(%)				
4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1	UNIT	57.061.696		2.860.000	5,01	25	APBD Kota PKP		
		Belanja Jasa Tenaga Supir			21.931.696	-	0					
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			1.800.000	-	0					
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			33.330.000		2.860.000					
		2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4	UNIT	27.500.000		3.918.400	14,25	25	APBD Kota PKP		
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.000.000	-	2.168.400					
		Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			19.500.000	-	1.750.000					
		3. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1	UNIT	21.271.696		4.378.616	20,58	33	APBD Kota PKP		
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan			21.271.696	-	4.378.616					
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHTAH DAERAH	1. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1	UNIT	6.100.000			0,00	4	APBD Kota PKP		
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			6.100.000	-						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
1	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1. PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	73.436.000		-	0,00	28	APBD Kota PKP		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.386.000							
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			30.000.000							
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.300.000							
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			10.000.000							
		Belanja Paket/Pengiriman			500.000							
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30.250.000							

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
		2	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN,JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	15.100.000		-	0,00	30	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.100.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		3	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	1	DOKUMEN	16.050.000		-	0,00	45	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.450.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.400.000						
			Honorarium Rohaniwan			1.200.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		4	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	1	DOKUMEN	10.000.000		-	0,00	54	APBD Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		5	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	1	LEMBAGA	144.298.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			14.013.000						
			Belanja Pakaian Olahraga			110.985.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.300.000						
		6	PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN	1	DOKUMEN	243.445.264		41.028.928	16,85	45	APBD Kota PKP	
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			233.445.264		41.028.928				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		7	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	DOKUMEN	14.200.000		-	0,00	37	APBD Kota PKP	
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			9.200.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.000.000						
		8	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	1	DOKUMEN	15.000.000		3.280.000	21,87	40	APBD Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000		3.280.000				

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
2	MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.	PENGELOLAAN MUTASI ASN	1	DOKUMEN	56.140.000		1.640.000	2,92	30	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			540.000						
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			4.500.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			25.000.000						
			Honorarium Penyelenggara Ujian			15.600.000						
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			-						
			Belanja Paket/Pengiriman			500.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000		1.640.000				
		2.	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	1	DOKUMEN	49.000.000		1.640.000	3,35	35	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			-						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			22.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			27.000.000		1.640.000				
		3.	PENGELOLAAN PROMOSI ASN	1	DOKUMEN	29.200.000		-	0,00	19	APBD Kota PKP	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.200.000						
			Honorarium Rohaniwan			10.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.000.000						
3	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	20	ORANG	10.000.000		6.536.600	65,37	66	APBD Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000		6.536.600				
		2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	6	ORANG	69.000.000		3.280.000	4,75	30	APBD Kota PKP	
			Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			24.000.000						
			Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			30.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000		3.280.000				
		3	EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	1	LAPORAN	25.449.000		0	0,00	5	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.400.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			9.100.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.949.000						
		4	FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	35	ORANG	18.200.000		0	0,00	66	APBD Kota PKP	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.600.000						
			Honorarium Rohaniwan			1.600.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
							RP	(%)			
4	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1. PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1	DOKUMEN	11.650.000		-	0,00	49	APBD Kota PKP	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.650.000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		2. PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	58	ORANG	22.285.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.985.000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.300.000						
		3. PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	1	LAPORAN	13.000.000		-	0,00	10	APBD Kota PKP	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.000.000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5	ORANG	20.000.000		-	0,00	10		APBD Kota PKP	
		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			20.000.000	-	0					

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
1	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75	ORANG	91.950.000		-	0,00	5		APBD Kota PKP	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.360.000							
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			37.000.000							
		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			18.000.000							
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.590.000							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN		VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
2	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1	LAPORAN	499.875.000		3.280.000	0,66	5	APBD Kota PKP	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			113.300.000						
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			366.575.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.000.000		3.280.000				
Total sampai dengan bulan ini						59.557.913.215		1.016.178.514	2	28		

Pangkalpinang, Maret 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

FAHRIZAL, S.T, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 198502062008041001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	83	83	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A	
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	27	100	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	39	39	47	N/A	N/A	47	N/A	N/A	
4.	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	78	100	79	79	100	-	-	-	-	-	-	
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	N/A	N/A	29	N/A	N/A	

	pendidikan dan pelatihan formal																				
6.	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	
7.	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	
8.	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	N/A	N/A	91	N/A	N/A	
9.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A	
10.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.6	1.47	56.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	61.50	35.68	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	23	71.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	113	97.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.728	1.728	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	83	84	85	82.5	83	83	84	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.5	7.8	22	23	24	21.2	22	22	23	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	47	49	50	45	47	47	49	
4	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi			78	79	0	0	0	78	79	0	0	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	0	30	31	33	0	0	30	31	
6	Persentase jumlah event yang dilaksanakan			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN			0	0	7	8	8	0	0	7	8	

8	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan			0	0	92	93	94	0	0	92	93	
9	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			0	0	33	33	37	0	0	33	33	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan Pegawai Secara Lebih Optimal Sesuai Kompetensi Serta Analisa Beban Kerja Dan Analisa Jabatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
5. Peningkatan Akurasi Data Pegawai
6. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara (*Flexibel Working Arrangement*)

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedianya sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (Assessment center).
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten.
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

2.4 Perubahan RKPD TAHUN 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

RPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2025	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	51.601.492.146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	51.601.492.146
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.80 Nilai			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.80 Nilai	
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	50.860.766.378	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	50.860.766.378
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	50.860.766.378	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	50.860.766.378
Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	302.341.700	Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	302.341.700
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.382.500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.382.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.027.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.027.700
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.320.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.320.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.072.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.072.000

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.539.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.539.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	281.880.676	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	281.880.676
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.880.676	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.880.676
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	30.670.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	30.670.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.100.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.570.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.570.000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	105.833.392	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	105.833.392
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.061.696	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.061.696
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-99%	20.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-99%	20.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	480.149.264	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	480.149.264
	Rasio pegawai fungsional	28%			Rasio pegawai fungsional	28%	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%			Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%	
	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%			Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%			Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%	
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	49%			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	49%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	329.244.264	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	329.244.264
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	56.436.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	56.436.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.100.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.100.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	6.050.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	6.050.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	14.013.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	14.013.000
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	233.445.264	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	233.445.264
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.200.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.200.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	73.570.000	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	73.570.000
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	48.390.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	48.390.000

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	7.980.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	7.980.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	17.200.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	17.200.000
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	69.700.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	69.700.000
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	7.500.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	7.500.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	59.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	59.000.000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	-	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	3.200.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	3.200.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	7.635.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	7.635.000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.650.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.650.000

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	58 Orang	2.985.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	58 Orang	2.985.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	538.675.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	538.675.000
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	54.400.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	54.400.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	75 Orang	54.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	75 Orang	54.400.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	484.275.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	484.275.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	484.275.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	484.275.000
			52.620.316.410				52.620.316.410

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan bahan kebijakan Pengadaan ASN
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - g. Pengelolaan data kepegawaian
 - h. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

- c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
- d. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- e. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan aset tetap lainnya
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							7.279.414.194,00	59.557.913.215,00	52.620.316.410,00	45.340.902.216,00						6.139.399.215,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.279.414.194,00	59.557.913.215,00	52.620.316.410,00	45.340.902.216,00							6.139.399.215,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.078.292.194,00	58.946.088.215,00	52.061.641.410,00	45.983.349.216,00							5.199.399.215,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				77.80 90 Nilai Nilai	77.80 90 Nilai Nilai	5.138.559.194,00	58.130.634.951,00	51.601.492.146,00	-1.331.295.579,00							3.807.263.615,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu				100 %	100 %	9.673.000,00	0,00	0,00	-9.673.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		12.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.895.000,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.000,00	0,00	0,00	-1.896.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.960.000,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2 Laporan	1.946.000,00	0,00	0,00	-1.946.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3 Laporan	1.976.000,00	0,00	0,00	-1.976.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP				100 %	100 %	3.789.270.794,00	57.443.549.083,00	50.860.766.378,00	47.071.495.584,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.003.609.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.787.364.794,00	57.443.549.083,00	50.860.766.378,00	47.073.401.584,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.001.109.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.906.000,00	0,00	0,00	-1.906.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	266.196.400,00	266.186.800,00	302.341.700,00	36.145.300,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		209.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.499.000,00	4.072.000,00	-3.428.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63.578.600,00	63.570.000,00	39.027.700,00	-24.550.900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.797.800,00	42.797.800,00	21.382.500,00	-21.415.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	235.539.500,00	85.539.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah				100 %	100 %	123.980.000,00	6.100.000,00	30.670.000,00	-93.310.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.370.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	730.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	28.690.000,00	0,00	24.570.000,00	-4.120.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	74.520.000,00	0,00	0,00	-74.520.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	565.909.000,00	288.965.676,00	281.880.676,00	-284.028.324,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		285.732.282,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			89.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			26.910.333,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	445.909.000,00	168.965.676,00	161.880.676,00	-284.028.324,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			168.941.949,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	348.530.000,00	105.833.392,00	105.833.392,00	-242.696.608,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		165.721.903,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.810.000,00	57.061.696,00	57.061.696,00	13.251.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			42.831.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	154.720.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-127.220.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			62.890.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	21.271.696,00	21.271.696,00	-128.728.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai fungsional Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan				100 28 49 8 93 % % % % %	100 28 49 8 93 % % % % %	974.733.000,00	835.453.264,00	480.149.264,00	457.402.600,00							1.432.135.600,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN.				100 %	100 %	513.347.000,00	531.529.264,00	329.244.264,00	-184.102.736,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		812.135.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	179.990.000,00	73.436.000,00	56.436.000,00	-123.554.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	49.994.000,00	15.100.000,00	5.100.000,00	-44.894.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.050.000,00	6.050.000,00	-13.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	23.300.000,00	10.000.000,00	0,00	-23.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	160.000.000,00	144.298.000,00	14.013.000,00	-145.987.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.001.000,00	243.445.264,00	233.445.264,00	203.444.264,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			328.410.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.070.000,00	14.200.000,00	9.200.000,00	-20.870.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			33.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	19.992.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-14.992.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN				100 %	100 %	218.762.000,00	134.340.000,00	73.570.000,00	-145.192.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	90.002.000,00	56.140.000,00	48.390.000,00	-41.612.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	49.000.000,00	7.980.000,00	-72.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	48.760.000,00	29.200.000,00	17.200.000,00	-31.560.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi.				100 %	100 %	173.129.000,00	122.649.000,00	69.700.000,00	-103.429.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				10 Orang	20 Orang	22.400.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-14.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	6 Orang	100.000.000,00	69.000.000,00	59.000.000,00	-41.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	25.749.000,00	25.449.000,00	0,00	-25.749.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				50 Orang	35 Orang	24.980.000,00	18.200.000,00	3.200.000,00	-21.780.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun.				100 %	100 %	69.495.000,00	46.935.000,00	7.635.000,00	-61.860.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	11.650.000,00	1.650.000,00	-23.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	58 Orang	19.995.000,00	22.285.000,00	2.985.000,00	-17.010.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	24.500.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	-21.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.201.122.000,00	611.825.000,00	558.675.000,00	-642.447.000,00							940.000.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				77.80 90 Nilai Nilai	77.80 90 Nilai Nilai	5.138.559.194,00	58.130.634.951,00	51.601.492.146,00	-1.331.295.579,00							3.807.263.615,00	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN				-99 %	-99 %	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				30 33 % %	30 33 % %	1.166.122.000,00	591.825.000,00	538.675.000,00	-266.122.000,00							900.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi				100 %	100 %	110.000.000,00	91.950.000,00	54.400.000,00	-55.600.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				75 Orang	75 Orang	110.000.000,00	91.950.000,00	54.400.000,00	-55.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional				100 %	100 %	1.056.122.000,00	499.875.000,00	484.275.000,00	-571.847.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	1.056.122.000,00	499.875.000,00	484.275.000,00	-571.847.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		J U M L A H							7.279.414.194,00	59.557.913.215,00	52.620.316.410,00	45.340.902.216,00						6.139.399.215,00		

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.